



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Soal pengakuan Somaliland, legislator puji Kemlu tolak langkah Israel
Tanggal	: Senin, 12 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Soal Pengakuan Somaliland

Legislator Puji Kemlu Tolak Langkah Israel

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak pengakuan sepihak Israel atas wilayah Republik Federal Somalia. Sikap itu ditegaskan melalui penandatanganan Pernyataan Bersama Para Menlu sebagai bentuk konsistensi Indonesia menjaga kedaulatan dan hukum internasional.

Menurut Sukamta, langkah diplomatik itu mencerminkan konsistensi dan keteguhan politik luar negeri Indonesia. Indonesia tetap menjunjung prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Posisi Indonesia dalam pernyataan bersama ini sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional dan komitmen global Indonesia," kata Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Kepentingan nasional dan komitmen global yang dimaksud, kata dia, adalah menolak segala bentuk legitimasi terhadap agenda separatisme. Apalagi, agenda itu berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi

stabilitas kawasan dan tatanan internasional.

Dia menilai, sikap Indonesia yang bergabung bersama para Menlu dari Yordania, Mesir, Aljazair, Iran, Palestina, Arab Saudi, Turki, Somalia, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya, merupakan wujud nyata solidaritas internasional. Indonesia tetap menjaga prinsip territorial integrity.

"Pernyataan Bersama negara-negara OKI menegaskan penolakan terhadap pengakuan sepihak Israel atas wilayah "Somaliland" termasuk mengcam keras kunjungan ilegal pejabat Israel ke wilayah itu," katanya.

Sikap Kemlu ini, sambungnya, bukanlah akhir, dan terus mendorong Kemlu untuk terus mengambil peran proaktif dan konstruktif. Antara lain, penguatan prinsip keutuhan wilayah Somalia melalui jalur multilateral dan mekanisme hukum internasional.

Menurut dia, konsolidasi posisi negara-negara anggota di forum OKI dan dukungan aktif terhadap langkah-langkah diplomatik di Majelis Umum PBB diperlukan. Kemlu terus memastikan norma



Sukamta

keutuhan wilayah negara tetap terjaga dan dihormati.

Politikus PKS itu juga mendukung secara positif langkah diplomasi Indonesia agar terus berada di garda depan dalam membela kedaulatan negara, menolak separatisme, dan menggakkan hukum internasional. Diplomasi Indonesia harus konsisten, dan berbasis hukum internasional untuk menjaga stabilitas Afrika Timur.

"Sehingga ikut berperan mengamankan jalur perdagangan internasional, serta memperkuat peran Indonesia sebagai perjaga norma internasional dan jembatan dialog global," ucapnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung sikap pemerintah Indonesia menolak pengakuan Israel atas kedaulatan Somaliland, wilayah separatis Republik Federal Somalia. "Sikap Indonesia sebagai negara merdeka adalah keputusan yang tepat dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri kita," tandasnya.

Dia menekankan, sejak awal Indonesia selalu menegaskan komitmen pada kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara. Hal itu juga sudah diatur dalam Piagam PBB. Dalam hal ini, Somaliland masih merupakan bagian dari Republik Federal Somalia.

"Karena itu, pengakuan sepihak atas kedaulatannya jelas tidak sesuai dengan norma hukum internasional," tegas legislator Partai Golkar itu.

Sebelumnya, OKI bersama 22 negara berpendukuk mayoritas

Muslim termasuk Indonesia mengecam keras kunjungan Menlu Israel ke Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia. Mereka menilai kunjungan itu melanggar hukum internasional dan merusak kedaulatan serta keutuhan wilayah Somalia.

OKI dan negara-negara pendatang kembali menegaskan dukungan penuh mereka terhadap kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Somalia. Mereka memperingatkan, dukungan terhadap agenda separatisme tidak dapat diterima dan berisiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.

"Penghormatan terhadap hukum internasional, prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara berdaulat, serta kepatuhan terhadap norma diplomatis merupakan hal mendasar bagi stabilitas regional dan internasional," bunyi pernyataan itu.

Pernyataan itu juga memuji Pemerintah Somalia di Mogadishu atas komitmennya terhadap keterlibatan internasional yang damai, diplomasi konstruktif, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. ■ PYB